



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum SKPD

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 162 Tahun 2001 tanggal 13 April 2001. Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat secara umum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Pembangunan Nasional dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang kemudian secara hierarkis dituangkan kedalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi dan urusan pembantuan yang di berikan oleh Pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

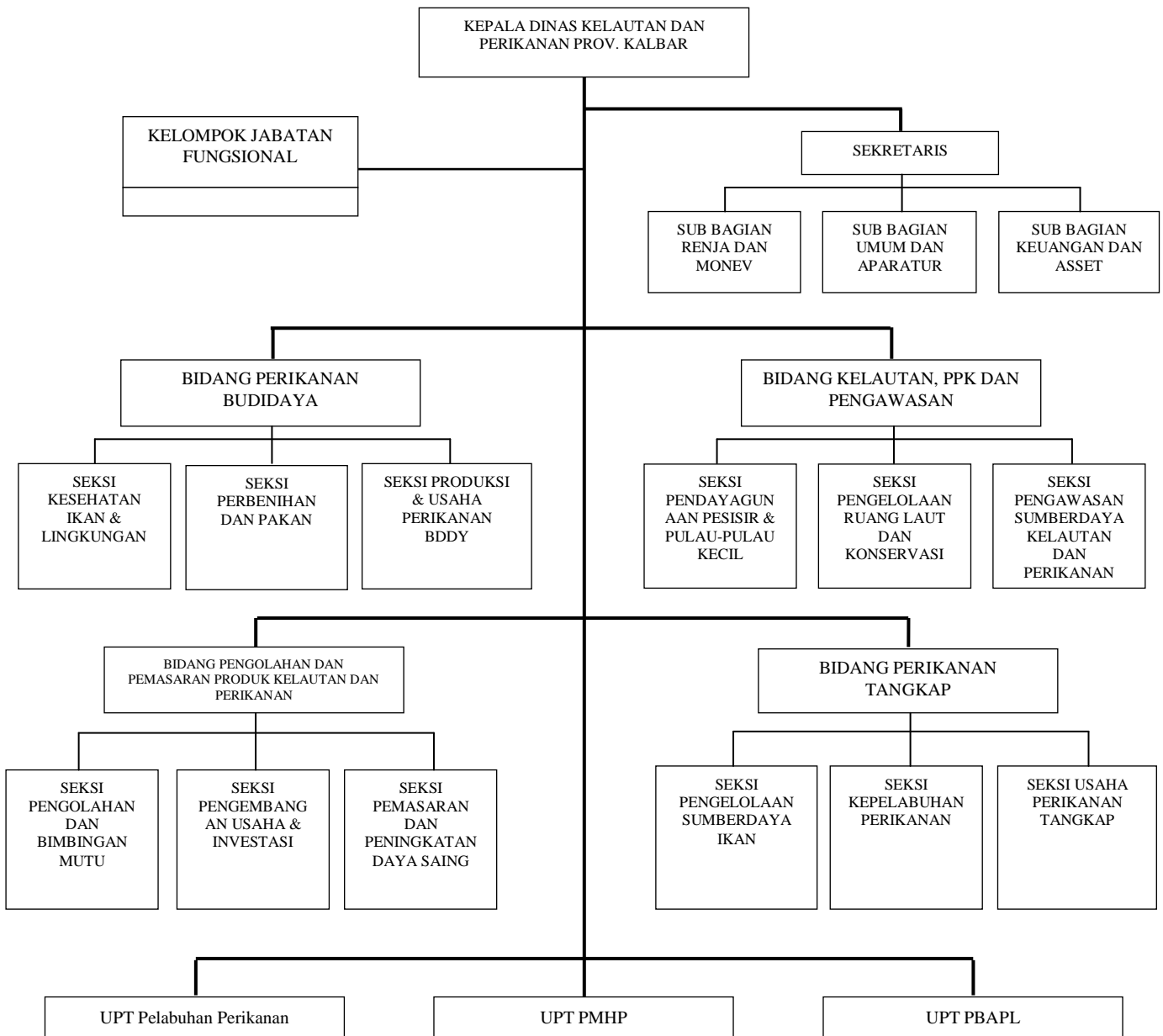
Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018 merupakan tahun Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013 – 2018 setelah pelaksanaan Pilkada langsung Provinsi Kalimantan Barat. Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD

Bagan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini *(sesuai perda no. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat)*

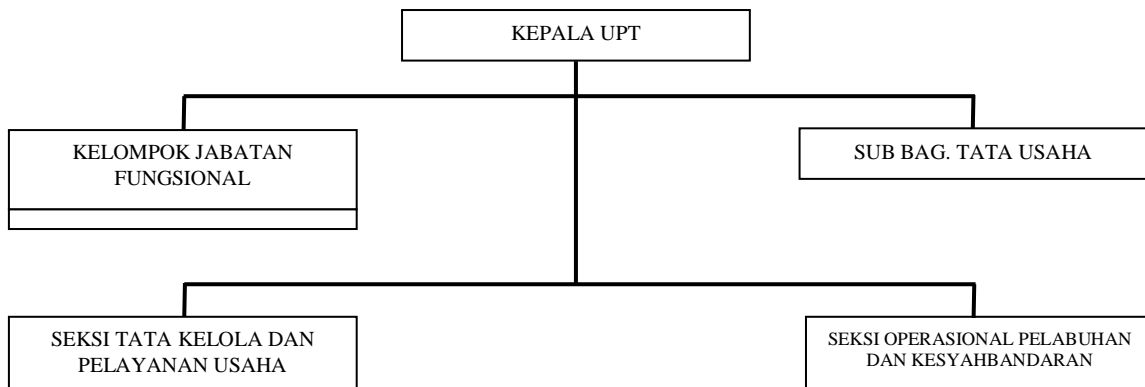


Tabel. 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR
 (Sesuai Pergub Nomor 114 Tahun 2016)

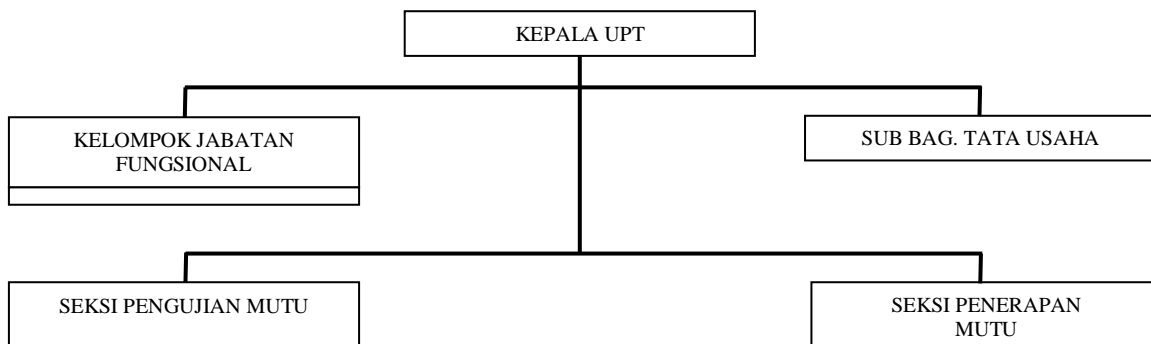




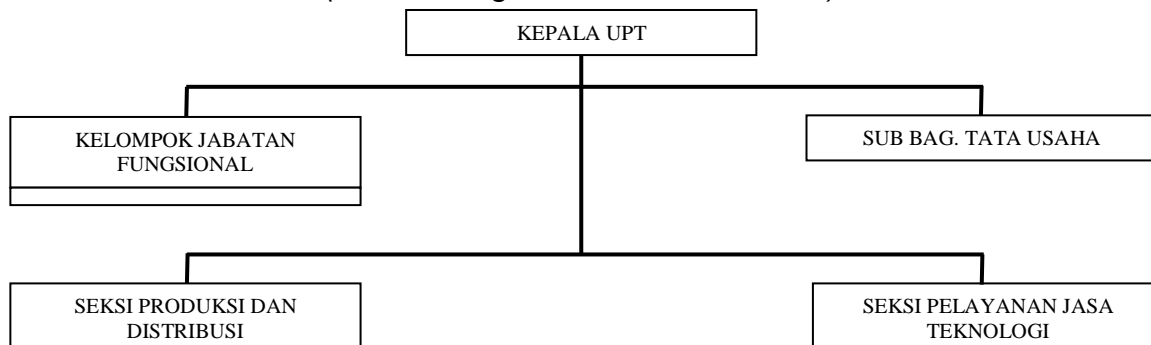
STRUKTUR ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN
(Sesuai Pergub No. 89 Tahun 2017)



STRUKTUR ORGANISASI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (UPT - PMHP)
(Sesuai Pergub No. 90 Tahun 2017)



STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL)
(Sesuai Pergub No. 91 Tahun 2017)





C. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :

 - Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan ;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
 - Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan ;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi UPT SKPD

a. UPT Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan di bidang pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- 1) Penyusunan program kerja UPT Pelabuhan Perikanan;
- 2) Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
- 4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan (sandar dan tambat labuh) kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan log book, pelayanan bongkar muat produk perikanan;
- 8) Pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 10) Pelaksanaan pelayanan tugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 11) Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantina ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pelabuhan perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.



b. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Penerapan mutu Hasil Perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan pangan hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis menguji ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis pengujian ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penerapan mutu hasil perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

c. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang perikanan budidaya air payau dan laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut



- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi dan distribusi;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan jasa teknologi;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan induk dan benih unggul ikan air payau dan laut yang bersertifikasi;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis penerapan hasil pengembangan aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pelayaran pengujian laboratorium secara mikrobiologis, organoleptik, kimia dan fisika terhadap kualitas air dan lingkungan budidaya ikan air payau dan laut;
- h. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyediaan induk unggul ikan air payau dan laut dalam rangka menunjang kegiatan unit pembenihan ikan air payau dan laut;
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya air payau dan laut;
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi mutu benih ikan air payau dan laut;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan budidaya air payau dan laut yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2018 berjumlah 134 orang yang terdiri dari 95 orang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang berjenis kelamin perempuan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2. Jumlah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Kalbar berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional TA. 2018

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL		STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
	-	Org		-	Org		-	Org
S3	-	-	Pembina Utama	-	-	Esselon I/b	-	-
S2	16	Org	Pembina Utama Madya	-	-	Esselon II/a	1	Org
S1/DIV	58	Org	Pembina Utama Muda	1	Org	Esselon II/b	-	-
DIPLOMA III	16	Org	Pembina Tingkat I	4	Org	Esselon III/a	5	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	10	Org	Esselon III/b	2	Org
SMA/SMK	39	Org	Penata Tingkat I	38	Org	Esselon IV/a	14	Org
SMP	2	Org	Penata	9	Org	Esselon IV/b	9	Org
SD	3	Org	Penata Muda Tingkat I	24	Org	Fungsional Widyaiswara	-	-
			Penata Muda	7	Org	Fungsional Auditor	-	-
			Pengatur Tingkat I	11	Org	Fungsional Kepegawaian	-	-
			Pengatur	25	Org	Fungsional Arsiparis	-	-
			Pengatur Muda Tingkat I	1	Org	Dokter	-	-
			Pengatur Muda	1	Org	Bidan/Perawat	-	-
			Juru	3	Org	Fungsional Pranata Komputer	-	-
						Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5	Org
						Fungsional Umum /Staf	98	Org
JUMLAH	134	Org	JUMLAH	134	Org	JUMLAH	134	Org

Sumber: DUK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

Adapun daftar pegawai per golongan, per jabatan dan per tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Daftar Urutan Kependidikan (DUK) Tahun 2018 sebagaimana *terlampir*.

E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, telah tersedia gedung kantor yang memadai serta perlengkapannya yang masih baik, berikut sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan :



Tabel 3. Data Inventaris Asset

No.	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH AKHIR Desember 2018		KONDISI
		Jumlah		
		Barang	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	TANAH (KIB A)	22	1.182.229.081	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN (KIB B)	1.019	20.580.352.764	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)	68	20.041.231.167	Baik
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)	18	6.151.780.987	Baik
5	ASET TETAP LAINNYA (KIB E)	8	104.438.872	Baik
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB F)	-	-	
	Jumlah	1.135	48.060.032.871	

Sumber data : Data Sementara Daftar Inventaris 2018



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

VISI Kepala Daerah Berdasarkan kondisi Provinsi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahunan dan amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nasional, maka Visi Kepala Daerah : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**.

VISI SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga organisasi publik, perlu menangkap peluang-peluang baru. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan, mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang diinginkan. Perubahan-perubahan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani/nelayan. Untuk itu diperlukan adanya VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. VISI adalah merupakan cara pandang jauh kedepan yang mempunyai nilai-nilai luhur yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun VISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT”

MISI SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

MISI adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan MISI, diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan mengetahui tugas, fungsi, peran dan program kerja serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Proses perumusan misi tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.



Sedangkan pernyataan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya untuk mengarahkan kegiatan yang lebih eksis dan dapat mengikuti efek globalisasi. Adapun **MISI** dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

B. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun 2013 – 2018

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik – mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil ;
2. Jangkauan jauh kedepan – dicapai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi;
3. Abstrak - belum tergambar dalam angka (kualitatif), upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus menerus/ berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan **TUJUAN** sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan.



4. Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. **Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai Berikut :**

1. Meningkatkan kemampuan pegawai yang profesional dengan didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tata kelola organisasi kepada publik yang optimal dengan mengacu prinsip-prinsip Good Governance
2. Semakin optimalnya program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung oleh data dan informasi kelautan dan perikanan yang valid, up to date dan aktual
3. Semakin meningkatnya capaian out put dan out come pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
4. Semakin optimalnya penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung IPM Kalbar.
5. Meningkatnya pengembangan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kepastian hukum untuk usaha pada sektor kelautan dan perikanan
6. Meningkatnya fungsi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk habitat dan berkembangbiaknya sumberdaya ikan Kalbar
7. Meningkatnya produktifitas usaha Perikanan Tangkap Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan SDI secara Optimal
8. Semakin Optimalnya Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Sui Rengas untuk Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
9. Meningkatnya produktifitas Usaha Perikanan Budidaya Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Terpeliharanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan
10. Optimalisasi Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Produksi Induk dan Benih Ikan Unggul Balai Benih Ikan Sentral untuk Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya



11. Meningkatnya Produktifitas Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Promosi Secara Optimal
12. Semakin Optimalnya Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
13. Meningkatnya unit usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Kalbar yang taat hukum dan memiliki izin usaha sesuai per UU yang berlaku
14. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan hukum pada sektor kelautan dan perikanan Kalbar

C. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan urusan kelautan dan perikanan diarahkan kepada peningkatan produksi dan daya saing komoditas produk hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak terhadap meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat Kalbar per kapita per tahun, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan; nelayan, pembudidaya ikan, pengolah serta pemasar komoditas produk hasil perikanan dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemetaan wilayah perairan yang layak secara teknis untuk usaha perikanan dan penyusunan RTRW dan Perda Tata ruang untuk sektor kelautan dan perikanan Kalbar
2. Optimalisasi pengelolaan, rehabilitasi ekosistem perairan dan pemulihan habitat sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalbar
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Iptek dan kegiatan ekonomi produktif
4. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
6. Optimalisasi peningkatan nilai tambah dan peningkatan promosi produk-produk olahan hasil perikanan melalui kegiatan pameran dan media masa



7. Optimalisasi dalam pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pada sektor kelautan dan perikanan Kalbar untuk taat hukum dan per UUan yang berlaku
8. Optimalisasi Pelayanan kepada Nelayan dan Masyarakat Perikanan melalui Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Sesuai Standar Teknis dan Kebutuhan Nelayan di PPP Sui Rengas
9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi dan pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas dan peran BBIS
10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dan Hasil Uji Mutu Labotarium kepada Masyarakat Perikanan pada LPPMHP Sui Rengas

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan mata pekerjaan yang diambil oleh pemerintah dalam lingkup tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional dan daerah, dasar kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selain bertumpu pada landasan idiil Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 45, juga pada landasan Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2013 – 2018. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran adalah dengan menentukan kebijakan.

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada :

- 1) Melaksanakan pemetaan potensi untuk pengembangan usaha pada sektor kelautan dan perikanan serta melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem perairan serta pemulihan habitat sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalbar.
- 3) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui lptek dan kegiatan ekonomi produktif.



- 4) Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- 5) Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- 6) Mendorong peningkatan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan melalui inovasi dan diversifikasi serta penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta promosi produk olahan hasil perikanan melalui media masa dan pameran.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pada sektor kelautan dan perikanan untuk taat dan tertib hukum sesuai UU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya



BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Anggaran Belanja dan Realisasi SKPD dan UPTD SKPD

Total alokasi dan realisasi dana APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 (**Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT PMHP, UPT PBAPL, UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat**) sebagaimana pada *Tabel 4*.

Tabel 4. Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD TA. 2018

Kode Rekening	Instansi/organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja TL	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang & Jasa	Modal		
Total SKPD		37.877.130.071	13.841.137.008	813.215.429	9.513.495.248	10.411.640.500	36.073.022.756	95,24
2.05.01.01	Tidak langsung	13.941.883.111	13.841.137.008				13.841.137.008	99,28
	Dinas	8.156.215.474		287.334.729	6.045.689.121	10.000.000	7.008.019.121	85,92
2.05.01.02	UPT PMHP	1.675.761.000		36.307.000	1.120.078.640	87.272.000	1.632.255.640	97,40
2.05.01.03	UPT PBAPL	5.650.695.575		67.222.000	961.902.365	3.936.583.600	5.393.360.965	95,45
2.05.01.05	UPT Pelabuhan Perikanan	8.452.574.911		422.351.700	1.385.825.122	6.377.784.900	8.198.250.022	96,99

B. Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan SKPD dan UPTD

Adapun anggaran dan realisasi belanja program dan kegiatan SKPD dan UPTD SKPD TA. 2018 secara rinci dapat dilihat pada *Tabel 5* pada lampiran.



BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat**.

Urusan Kelautan dan Perikanan tersebut diwujudkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah yang Pertama yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat”**. Selanjutnya Prioritas Pembangunan Daerah tersebut diimplementasikan ke dalam **Sasaran Strategis** dengan pengukuran **Indikator Kinerja** sebagaimana tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis Ke-4 “Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat (sektor perikanan)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi				Tingkat Kemajuan (%)
		2017		2018*		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapat masyarakat	1. Volume produksi perikanan (Ton)	251.750,84	240.294,37	276.477,96	248.672,66	3,49
	a. Perikanan tangkap	180.107,84	162.367,22	190.506,96	165.445,27	1,90
	b. Perikanan budidaya	71.643,00	77.927,15	85.971,00	83.227,39	6,80

2018 *) Angka Sementara

Pencapaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapat masyarakat”** diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 989.417.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 861.105.677,-. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :



- 1) **Peyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 453.383.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 396.703.167,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah berupa Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Barat dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi output kegiatan ini berupa Dokumen Final RZWP-3-K, Peta Alokasi Ruang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Ranperda RZWP-3-K sebagai amanat UU nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengenai wilayah perencanaan mencakup wilayah pesisir (kecamatan pesisir) dan wilayah laut 0-12 mil sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Acuan Penyusunan berdasarkan Kepmen KP Nomor 23/Kepmen/2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Outcome yang dihasilkan berupa terintegrasinya dan tertatanya rencana pengelolaan wilayah pesisir. Persentase kinerja 100%.

- 2) **Rehabilitasi, Konservasi Ekosistem sebagai Habitat Sumberdaya Ikan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan pagu anggaran sebesar Rp 88.794.000,- dan realisasi sebesar Rp 87.940.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah terlaksananya penanaman mangrove/tanaman pantai sebanyak 10.380 batang dan transplantasi karang 40 unit di Kab/Kota. Realisasi output kegiatan ini adalah adalah terlaksananya penanaman cemara laut sebanyak 9.800 batang, ketapang 580 batang dan transplantasi karang sebanyak 40 unit. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kubu Raya. Outcome dari kegiatan ini bertambah baiknya ekosistem pesisir dan laut kalbar sebagai habitat sumberdaya ikan di 1 kawasan (Kab. Bengkayang). Persentase kinerja 100%.



- 3) **Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp 114.876.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 89.336.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah pembinaan desa mandiri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kelautan dan perikanan di 2 Desa. Dan realisasi output kegiatan ini adalah kegiatan temu lapang dengan masyarakat pesisir yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas dengan peserta sebanyak 35 orang dengan topik materi pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir menuju kemandirian ekonomi; pengembangan produk olahan dan ekonomi kreatif berbasis kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengembangan koperasi sebagai wadah masyarakat pesisir menuju hidup yang sejahtera; pembagian leaflet/poster pengelolaan dan mitigasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Barat; Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melibatkan unsure masyarakat. Outcome dari kegiatan ini adalah terbinaanya desa mandiri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kelautan dan perikanan. Persentase kinerja 100%.
- 4) **Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan pagu anggaran sebesar Rp 119.894.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.286.500,- . Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (kedai pesisir dan air bersih), dan realisasi output kegiatan ini adalah terselenggaranya jasa konsultasi perencana kedai pesisir (1 paket) di Pulau Lemukutan Kecamatan sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan bantuan bak penampungan air bersih masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Kelompok “Sejahtera” di Desa sungai Pangkalan II Kabupaten bengkayang. Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 5) **Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** dengan pagu anggaran sebesar Rp 39.479.000,- dan realisasi sebesar Rp 32.139.000,- . Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah rapat teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan peserta sebanyak 30 peserta, dan realisasi output kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat teknis pengelolaan wilayah



pesisir dan pulau-pulau kecil dengan peserta sebanyak 30 orang yang menangani kegiatan pesisir dan pulau-pulau kecil dari 7 kab/kota pesisir di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar dan SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan (Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Dinas Perindustrian). Outcome dari kegiatan ini adalah semakin terkoordinasinya dan sinerginya pelaksanaan program dan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna meningkatnya efektifitas dan capaian hasil program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

- 6) **Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalimantan Barat** dengan pagu anggaran sebesar Rp 78.318.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 73.649.110,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah berupa meningkatnya pemahaman dan kecintaan terhadap budaya kelautan dan perikanan masyarakat pesisir melalui kegiatan pesisir bersih sehat dan lestari sebanyak 200 orang. Dan realisasi output kegiatan ini adalah berupa a) kegiatan sosialisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara verbal dan dibagikan brosur atau leaflet untuk secara sadar turut serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir; b) Gerakan bersih pantai dan pembagian tempat sampah/kantong sampah kepada kelompok masyarakat pesisir di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan (Pulau Lemukutan) Kabupaten Bengkayang. Outcome dari kegiatan ini adalah semakin meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut. Persentase kinerja 100%.

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.682.679.450,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.452.149.350,-. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Apresiasi/Sosialisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan** dengan pagu anggaran awal Sebesar Rp. 92.658.000,- dan pagu setelah rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 3.590.000,- dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 3.590.000,-. Selanjutnya target output



kegiatan adalah Nelayan KUB yang terbina dengan sosialisasi pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan. Realisasi output kegiatan berupa pelatihan/bimbingan teknis kepada anggota KUB nelayan sebanyak 90 peserta. Outcome Kegiatan berupa terbinanya KUB dalam rangka pengelolaan Perikanan Ramah Lingkungan, bertanggungjawab dan berkelanjutan. Persentase Kinerja 3,81%. Kegiatan Apresiasi/Sosialisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2018.

- 2) **Pengumpulan dan Analisis Data CPUE (Catch Per Unit Effort) Perikanan Tangkap dengan** pagu anggaran setelah rasionalisasi sebesar Rp. 109.954.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.501.100,-. Target output kegiatan berupa laporan analisis CPUE Perikanan Tangkap Perairan Laut Kalimantan Barat, dan Realisasi output kegiatan berupa adanya laporan kegiatan analisis CPUE Perikanan Tangkap Laut Kalimantan Barat guna mengidentifikasi status pengelolaan perikanan tangkap Kalimantan Barat, dilakukan di 8 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada 4 Kabupaten yaitu : PPI Pemangkat dan Selakau di Kabupaten Sambas; PPI Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah; PP Sungai Rengas, PPI Sungai Kakap dan PPI Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya; PPI Kendawangan dan PPI Sukabangun di Kabupaten Ketapang. Outcome kegiatan yaitu teridentifikasinya status pengelolaan SDI perikanan tangkap Provinsi Kalimantan Barat. Persentase Kinerja 100%.
- 3) **Sosialisasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.549.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.529.600,-. Selanjutnya target output kegiatan adalah pelaksanaan Identifikasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Replacement Alat Tangkap Dilarang Kepada alat tangkap ramah lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di 6 lokasi. Realisasi output kegiatan berupa sosialisasi, pertemuan, rapat, pembinaan dan pendampingan kepada nelayan pengguna alat tangkap trawl dan nelayan togo dan kelong terdampak pembangunan



terminal pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah. Lokasi di 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Sambas, Singkawang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang, yang mencakup pengguna alat tangkap dilarang (trawl) dan alat tangkap togo dan kelong di Kabupaten Mempawah. Outcome kegiatan berupa terfasilitasinya API pengganti bagi nelayan yang menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan meningkatnya kesadaran serta kepatuhan hukum di Bidang Perikanan Tangkap khususnya pada penggunaan alat tangkap ramah lingkungan pengganti alat tangkap dilarang pemerintah. Persentase Kinerja 100%.

- 4) **Pembuatan Apartemen/Rumah Ikan/Fish Shelter dan Rumpon di Perairan Kalimantan Barat** dengan pagu anggaran awal Rp. 191.056.100,- tetapi pagu anggaran setelah rasionalisasi sebesar Rp. 7.440.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.440.000,-. Target output kegiatan berupa pembuatan rumah ikan sebanyak 1 unit yang berfungsi untuk meningkatkan ekosistem perairan laut dan Sumberdaya Ikan perikanan tangkap di Kalimantan Barat. Dan output kegiatan berupa : Konsultasi dan koordinasi teknis ke KKP dan koordinasi terkait pengadaan rumah/apartemen ikan di Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang serta identifikasi teknis calon penerima/nelayan penerima di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Outcome kegiatan meningkatnya pengetahuan produktifitas SDI perikanan tangkap melalui pengkayaan SDI perikanan laut Provinsi Kalimantan Barat. Persentase Kinerja 3,89%. Kegiatan Pembuatan Apartemen/Rumah Ikan/Fish Shelter dan Rumpon di Perairan Kalimantan Barat ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2018.
- 5) **Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan** dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 117.769.800,-, Pagu Anggaran Setelah rasionalisasi sebesar Rp. 86.986.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.184.600,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini berupa Identifikasi/Pendataan/Supervisi Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi. Realisasi output berupa teridentifikasinya dan terdatanya Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi di Kalimantan Barat. Outcome kegiatan



termonitoringnya pelabuhan perikanan di Kalimantan Barat, serta terkumpulnya data-data pelabuhan perikanan yang mana layak diserahkan ke provinsi sesuai ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

- 6) **Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.641.050,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.335.500,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah operasional peningkatan dan pengembangan pelabuhan perikanan. Realisasi output berupa meningkatnya kinerja pelabuhan kewenangan provinsi. Outcome kegiatan meningkatnya sarana dan prasarana pelabuhan kab/kota yang menjadi wewenang Provinsi dan Terwujudnya perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan sesuai tahapan perencanaan yang diamanahkan PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 7) **Sosialisasi dan Pelaksanaan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan < 30 GT** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.275.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.473.200,-. Selanjutnya target output kegiatan ini berupa terlaksananya sosialisasi pendaftaran dan penandaan kapal perikanan. Realisasi output berupa terlaksananya kegiatan sosialisasi pendaftaran dan penandaan kapal. Outcome kegiatan terdatanya kapal-kapal perikanan yang di bawah 30GT. Presentase kinerja yang dicapai 100%.
- 8) **Pengelolaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Kalbar** dengan pagu anggaran kegiatan ini adalah senilai Rp. 153.354.500,- dan realisasi keuangan senilai Rp. 138.033.000,-. Target output kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap dalam rangka penerbitan perizinan usaha bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Barat berupa 200 Rekomendasi Teknis (SIUP, SIPI, SIKPI). Pelayanan perizinan dimaksud dilakukan dalam bentuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen permohonan perizinan usaha perikanan tangkap dan disertai dengan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Realisasi output kegiatan ini adalah penerbitan 200 dokumen pertimbangan teknis perizinan usaha perikanan tangkap dari target 200 dokumen.



Outcome kegiatan ini adalah terjaminnya kesesuaian fisik KAPI di lapangan dengan keterangan di dokumen perizinan yang diterbitkan. Presentase kinerja yang dicapai 100%.

- 9) **Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi Adaptif dan Terbarukan** dengan pagu anggaran awal kegiatan ini sebesar Rp. 126.910.100,- dan anggaran setelah rasionalisasi sebesar Rp. 8.320.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.320.000,-. Target output kegiatan ini adalah pengadaan mesin sampan/perahu bermotor berbahan bakar bensin dan gas sebanyak 1 paket. Realisasi output kegiatan ini baru dalam tahap verifikasi kelompok, namun kegiatan pengadaannya tidak dilaksanakan disebabkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2018. Outcome kegiatan ini adalah terverifikasinya kelompok calon penerima. Persentase kinerja tidak ada.
- 10) **Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 113.707.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.350.000,-. Selanjutnya target output kegiatan adalah Bantuan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan berupa 2 paket alat tangkap ikan untuk 2 KUB Nelayan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang. Realisasi output kegiatan berupa terverifikasinya kelompok calon penerima, namun kegiatan pengadaan tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA. 2018 dan Surat Gubernur nomor : 027/2811/Adm.PPBJ-C tanggal 2 Oktober 2018 tentang pembatalan proses/hasil Pengadaan Barang/Jasa yang belum dilaksanakan. Outcome kegiatan berupa terverifikasinya KUB perikanan tangkap. Persentase Kinerja 6,46%.
- 11) **Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi Adaptif dan Terbarukan di Kabupaten Mempawah** dengan pagu Anggaran kegiatan ini adalah senilai Rp. 200.000.000,- realisasi keuangan senilai Rp. 190.094.300,-. Target output dari kegiatan ini adalah pengadaan mesin sampan/perahu bermotor berbahan bakar bensin dan gas sebanyak 1 paket. Realisasi output



kegiatan ini adalah pemberian bantuan mesin perahu berbahan bakar bensin dan gas sebanyak 17 unit. Masyarakat nelayan yang menjadi penerima dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Kelompok Nelayan “Nelayan Kecil” yang berdomisili di Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap nelayan skala kecil. Presentase kinerja yang dicapai 100%.

- 12) **Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan Kabupaten Mempawah** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.485.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 186.576.300,-. Target output kegiatan ini adalah pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Alat penangkap ikan dimaksud terdiri dari trammel net sebanyak 171 pieces, gill net sebanyak 69 pieces, dan bubu sebanyak 44 unit. Realisasi output kegiatan ini adalah pengadaan dan pemberian bantuan 171 pieces trammel net, 69 pieces gill net, dan 44 unit bubu kepada masyarakat yang menjadi penerima yaitu sebagai berikut : a) Trammel net sebanyak 39 pieces kepada Kelompok Nelayan “Penyu Hijau” yang berdomisili di Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah; b) Trammel net sebanyak 27 pieces kepada Kelompok Nelayan “Sumber Rezeki” yang berdomisili di Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah; c) Trammel net sebanyak 30 pieces kepada Kelompok Nelayan “Udang Putih” yang berdomisili di Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah; d) Trammel net sebanyak 36 pieces kepada Kelompok Nelayan “Taruna Jaya” yang berdomisili di Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah; e) Trammel net sebanyak 39 pieces kepada Kelompok Nelayan “NKDB” yang berdomisili di Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah; f) Gill net sebanyak 36 pieces kepada Kelompok Nelayan “Permai” yang berdomisili di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah; g) Gill net sebanyak 33 pieces kepada Kelompok Nelayan “Tenggiri Papan” yang berdomisili di Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah; h) Bubu sebanyak 44 unit kepada Kelompok Nelayan “Pangkap Bubu” yang berdomisili di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap. Presentase kinerja 100%.



- 13) **Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan Kabupaten Ketapang** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.375.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 202.228.750,-. Target output kegiatan ini adalah pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang berupa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Alat penangkap ikan dimaksud adalah berupa gill net sebanyak 100 pieces. Realisasi output kegiatan ini adalah pengadaan dan pemberian bantuan 100 pieces gill net kepada masyarakat yang menjadi penerima yaitu sebagai berikut: a) Gill net sebanyak 30 pieces kepada Kelompok Nelayan “Muara Mandiri” yang berdomisili di Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang; b) Gill net sebanyak 30 pieces kepada Kelompok Nelayan “Fajar Mandiri” yang berdomisili di Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang; c) Gill net sebanyak 40 pieces kepada Kelompok Nelayan “Tanjung Abadi” yang berdomisili di Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap. Presentase kinerja 100%.
- 14) **Pengadaan/Bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan Desa Karimunting** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 194.801.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini berupa Bantuan Sarana dan prasarana penangkapan ikan berupa 1 paket kapal penangkap ikan di Desa Karimunting . Realisasi output berupa Pengadaan/Bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan di Desa Karimunting yang diberikan kepada KUB “Bintang Timur”. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap. Presentase kinerja yang dicapai 100% .
- 15) **Pengadaan/Bantuan Kapal motor Penangkapan Ikan Dusun Sungai Soga** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 186.692.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini berupa Bantuan Sarana dan prasarana penangkapan ikan berupa 1 paket kapal penangkap ikan di Dusun Sungai Soga . Realisasi output berupa Pengadaan/Bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan di Dusun Sungai Soga. kepada KUB “Harapan Bersama”. Outcome kegiatan ini adalah



meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap. Presentase kinerja yang dicapai 100% .

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.195.96.550,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.066.360.150,-. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Pembenihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)** dengan pagu dana anggaran sebesar Rp. 72.830.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 68.142.000,00. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah tersedianya 10 buah Sertifikat CPIB (Ikan Lele, Nila, dan Mas) dan realisasi output kegiatan ini adalah berupa 12 buah Sertifikat CPIB. Outcome dari kegiatan ini adalah UPR yang telah memiliki Sertifikat CPIB dapat dipastikan kualitas benihnya baik dan kalau ada instansi yang akan mengadakan benih dapat diperoleh dari UPR yang bersertifikat CPIB. Bantuan benih baik dari Kabupaten, Provinsi, dan Pusat akan diberikan kepada UPR yang diutamakan memiliki Sertifikat CPIB. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 2) **Pemantauan dan Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.607.500,00. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 77.183.000,00. Target output kegiatan ini berupa jumlah unit pembudidaya bersertifikat CBIB sejumlah 100 Sertifikat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar teknis sebanyak 100 unit. Realisasi output kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan sehingga lulus saat dilakukan audit sertifikasi CBIB kepada 100 Pokdakan dengan rincian di Kab. Kubu Raya sebanyak 40 unit, di Kab. Bengkayang sebanyak 20 unit, di Kab. Ketapang sebanyak 20 unit, di Kab. Sambas 20 unit dengan komoditas ikan berupa udang, bandeng, nila, mas dan lele. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar teknis. Persentase kinerja yang dicapai sebesar 100%.
- 3) **Pengembangan dan peningkatan usaha perikanan budidaya air laut** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.282.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.890.000,-. Target output kegiatan ini berupa meningkatnya wawasan budidaya ikan air laut melalui apresiasi/magang. Realisasi output kegiatan ini berupa pengembangan wawasan budidaya air laut khususnya cara budidaya



ikan bawal bintang, kerapu cantang dan kakap putih berlokasi di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan Pokdakan melalui apresiasi/magang. Persentase kinerja yang dicapai adalah 100%.

- 4) **Pemantauan dan Pengendalian Hama Penyakit dan Residu di Kawasan Usaha Perikanan Budidaya** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.830.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.509.400,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah terpantaunya dan terkendalnya Hama Penyakit Ikan dan Residu di Kawasan Usaha Perikanan Budidaya dengan target 3 Jenis (Bakteri, jamur dan virus). Realisasi output kegiatan ini adalah terpantau dan terkendalnya Hama Penyakit Ikan dan Residu di Kawasan Usaha Perikanan Budidaya, (dari identifikasi penyakit tersebut kabupaten yang terpapar (1). *Parasit Dactylogirussp*, dan *Chimothoa exiqua*, (2) *Bakteri Aeromonas salmonisida (negative)*, (3). *Virus TVS, IMNV, WSSV (negative)*). Hasil pemantauan tidak ditemukan parasit, bakteri dan virus ini sehingga tidak terjadi kematian massal di kawasan budidaya perikanan. Outcome kegiatan ini adalah terpantaunya dan terkendalnya hama penyakit ikan dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 5) **Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Obat-Obatan dan Pakan Untuk Usaha Perikanan Budidaya** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.150.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.564.200,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah terpantaunya dan terkendalnya Obat Ikan dan Pakan yang terjamin Mutu Keamanan dan Khasiatnya dengan target 4 sampel obat ikan terdaftar dengan terealisasi 29 jenis obat ikan terdaftar dan terjamin Mutu Keamanan dan khasiatnya. Realisasi output kegiatan ini adalah terpantau dan terkendalnya obat ikan dan pakan yang terjamin mutunya (29 jenis obat yang telah terdaftar) terdiri dari (1). Biovit Aquatic, (2). C-San Aquatic, (3). Destan Aquatic, (4). Lodan, (5). EM4, (7). Lodan, (8). Omega Protein, (9). Premium C Aquatic, (10) Boster Stress Off, (11). Planktop, (12) Grotop, (13) Manstop, (14) San 02, (15). Boster Blue Coper, (16). Stres Off, (17). Premix Aquavita, (18). Boster Blue Coper, (19). Progol, (20). Fumisid, (21) Boster, (22). Super Fish, (23) Petrogrow, (24) Boster Plankton (cair), (25) Never gree (anti lumut) (cair), 26. Boster Vitaliquit cair, (27) Teger -02 cair, (28) New Raja Ikan, (29) Suplemen Organik Cair (GDM) dan terdapat jenis obat yang belum terdaftar 32 jenis terdiri dari (1). Boster



Infloroks 25 (2). Minaraya, (3). Pidas, (3). Tetra Siklin, (4). Cyperkiller (5). Yakult, (6). Mr. Kevin, (7). Kevin Penjernih, (8). Kevin Vitamin, (9). Kevin Plus, (10). Kevin Blue (11). Biotik, (12). Kutu Bals, (13). Protik, (14). My Copur, (15). Baktopur, (16). Pommate, (17). Air Bayu, (18). Vitamin E, (19). Boster Aqua Septic, (20). Costapur, (21). Rid All, (22). Riody Aquarium, (23). Bliits (white spot), (24). Methylene Blue, (25). Sprulina Power, (26). Fistamin, (27). Rid All (Anti Chlorin),(28). Veteran plus cair, (29). EM4 Kuning cair/ herbal, (30). EM4 putih cair/ herbal, (31), TON cair, (32). Ovaprint (Syndel) dan sudah di sarankan kepada pembudidaya untuk menggunakan obat ikan yang sudah terdaftar di KKP dan menyarankan kepada distributor/took/depo obat ikan untuk mendaftarkan produk obatnya ke KKP. Outcome dari kegiatan ini adalah terpantau dan terkendalinya obat ikan dan pakan yang terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

- 6) **Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.848.000,- dan realisasi sebesar keuangan sebesar Rp. 27.848.000,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah jumlah penyakit ikan budidaya yang dapat diuji dengan target 2 jenis (parasit dan kualitas air). Realisasi output kegiatan ini adalah terlaksananya identifikasi penyakit ikan yang biasanya mewabah (*Parasit Dactylogirus sp*, dan *Chimothoa exiqua*, namun tidak sampai mewabah di kawasan budidaya lainnya dan dari pengukuran kualitas air di kawasan budidaya perikanan dengan hasil bahwa kualitas air budidaya masih sesuai dengan standar untuk budidaya perikanan,. Outcome dari kegiatan ini adalah terpantaunya parasit dan kualitas air sehingga tahun 2018 tidak terjadi kematian massal sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 7) **Bantuan Peralatan Pakan Ikan Mandiri** dengan pagu anggaran awal kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan anggaran setelah rasionalisasi sebesar Rp. 8.610.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.230.000,-. Target output kegiatan ini adalah bantuan peralatan pakan ikan sebanyak 2 unit. Realisasi output kegiatan ini baru dalam tahap verifikasi kelompok, namun kegiatan pengadaannya tidak dilaksanakan disebabkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang rasionalisasi anggaran pada OPD sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 903/2115/TPAD tentang Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD TA.



2018. Outcome kegiatan ini adalah terverifikasinya kelompok calon penerima. Persentase kinerja tidak ada.

- 8) **Percontohan budidaya ikan unggul dan memiliki prospek pasar yang baik** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.630.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.692.000,-. Target output kegiatan ini adalah terlaksananya percontohan budidaya laut /payau sebanyak 1 unit. Realisasi output kegiatan ini adalah pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan kelautan dan perikanan sebanyak 4 unit Kincir Air kepada KSU. “Nelayan Paloh” agar dapat dijadikan contoh POKDAKAN yang memiliki usaha ikan unggul dan memiliki prospek pasar yang baik. outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya laut /payau sebanyak 1 unit. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 9) **Penyediaan Pakan Ikan Untuk Pembudidaya** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 119.994.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.317.000,-. Selanjutnya taget output kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan pakan ikan untuk Pokdakan dan realisasi output kegiatan ini adalah penyediaan pakan ikan nila salin sebanyak 6.250 Kg di Kabupaten Mempawah bagi Kelompok “Berkah Usaha” di Desa Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya ikan dan mengurangi biaya kelompok untuk pembelian pakan. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 10) **Penyediaan Calon Induk dan Benih Ikan Untuk Pembudidaya (Tawar, Payau, dan Laut)** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.206.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.097.000,-. Selanjutnya taget output kegiatan ini adalah benur udang windu dan benih nila salin, dan realisasi output kegiatan ini adalah berupa benih ikan nila salin sebanyak 40.000 ekor yang diberikan kepada Kelompok “Berkah Usaha” di Desa Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur. Sedangkan benur udang windu tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan direvisi, dan DPA perubahan baru terbit saat sudah mendekati akhir tahun dan memasuki musin penghujan, sehingga pengadaan benur udang windu tidak dapat dilaksanakan. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya ikan. Persentase kinerja yang dicapai 85%.
- 11) **Bantuan Kolam Ikan Rakyat di Kabupaten Sintang** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.280.000,- dan realisasi keuangan sebesar



Rp. 87.450.000,-. Target output kegiatan ini berupa penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya sebanyak 1 unit. Realisasi output kegiatan ini berupa pembangunan kolam ikan di Desa Sekubang Kec. Sepauk, Kabupaten Sintang bagi POKDAKAN "Kaban Bersatu". outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok pembudidaya ikan. Persentase kinerja yang dicapai adalah 100%.

- 12) **Bantuan Pakan Ikan di Kabupaten Mempawah** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.285.000,00. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan pakan ikan untuk Pokdakan berupa pakan ikan nila salin, dan realisasi output kegiatan ini adalah berupa pakan ikan nila salin sebanyak 5.916 Kg yang diberikan kepada Kelompok "Sukses Bersama" yang beralamat di Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong dan Kelompok "Maju Usaha" yang beralamat di Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok budidaya ikan. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 13) **Bantuan Benih Ikan di Kabupaten Mempawah** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.349.000,00. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan benih ikan untuk Pokdakan, dan realisasi output kegiatan ini adalah berupa penyediaan benih ikan nila salin sebanyak 97.050 ekor yang diberikan kepada Kelompok "Sukses Bersama" yang beralamat di Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong dan Kelompok "Maju Usaha" yang beralamat di Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kegiatan usaha kelompok budidaya ikan. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 14) **Fasilitasi Magang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut** dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.750.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.750.000,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kompetensi masyarakat sebanyak 120 orang. Realisasi output kegiatan ini berupa fasilitasi magang bagi 185 orang yang berasal dari masyarakat pembudidaya. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan pembudidayaan ikan masyarakat Kalimantan Barat. Persentase kinerja yang dicapai 100%.



- 15) **Pengembangan Budidaya Air Payau** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.026.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.526.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah meningkatnya produksi hasil perikanan budidaya 2 komoditas yang menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), dan realisasi output kegiatan ini berupa tersusunnya dokumen implementasi panduan mutu CPIB serta pengusulan sertifikasi, supervisi, dan evaluasi untuk udang windu dan ikan nila salin. Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya benur udang windu dan benih ikan nila salin unggul. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 16) **Pembenihan Udang Windu** dengan pagu anggaran sebesar Rp 119.672.500,- dan realisasi sebesar Rp. 119.047.500,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah benur udang windu 902.846 ekor dan realisasi output kegiatan ini berupa belanja bahan pakai habis, belanja obat-obatan, pengadaan induk, belanja perlengkapan/peralatan, belanja pakan dan belanja bahan/material yang digunakan sebagai bahan dan sarana untuk operasional pembenihan udang windu sehingga dicapai produksi benur udang windu sebanyak 1.585.000 ekor. Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya benur udang windu. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 17) **Pembenihan Ikan Bandeng** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.097.500,- dan realisasi sebesar Rp 43.097.500,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah benih ikan bandeng sebanyak 750.000 ekor. dan realisasi output kegiatan ini berupa belanja bahan pakai habis, belanja obat-obatan, pengadaan nener bandeng (D-2), pengadaan bahan kimia, belanja perlengkapan/peralatan, belanja pakan, dan belanja bahan/material yang digunakan sebagai bahan dan sarana untuk operasional pembenihan ikan bandeng sehingga dicapai produksi nener bandeng sebanyak 750.000 ekor. Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya benih/nener ikan bandeng. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 18) **Pembenihan Ikan Nila Salin** dengan pagu anggaran sebesar Rp 88.582.550,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 85.432.550,-, target output berupa benih ikan nila salin sebanyak 250.000 ekor, dan realisasi output berupa belanja bahan pakai habis, belanja bahan kimia, pengadaan calon induk, belanja perlengkapan/peralatan, belanja pakan, belanja bahan/material yang digunakan sebagai bahan dan sarana untuk operasional pembenihan ikan nila salin sehingga



dicapai produksi benih ikan nila salin sebanyak 327.900 ekor. Outcome yang dicapai adalah tersedianya benih ikan nila salin. persentase kinerja yang dicapai 100%.

D. Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 515.478.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 488.388.129,-. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp 74.962.500,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp 74.890.700,-. Target output yaitu terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha perikanan pada sentra-sentra usaha perikanan (pelabuhan perikanan, kawasan budidaya ikan di kolam dan tambak, sentra pengolahan dan pemasaran ikan) di 14 kabupaten/ kota se Kalimantan Barat. Realisasi output yang dicapai adalah terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha perikanan pada sentra-sentra usaha perikanan (pelabuhan perikanan, kawasan budidaya ikan di kolam dan tambak, sentra pengolahan dan pemasaran ikan) di 10 Kabupaten/ kota se di Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Mempawah Hilir, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kab. Landak, Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau) dengan hasil pelaksanaan berupa : a) Ditemukan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan usaha perikanan (SIUP, SIPI, SIBI SIKPI, SPB dan SLO) setiap usaha perikanan yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku; b) Diperolehnya data dan informasi tentang kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha bidang perikanan tangkap dalam hal pengurusan dokumen perizinan. Outcome kegiatan ini adalah semakin bertambahnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran pelaku usaha perikanan untuk taat dan tertib sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam melakukan usaha dibidang perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.
- 2) **Gelar Operasi Pengawasan SDI, Ekola dan Jasla** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 345.566.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 345.147.500,-. Target output berupa terlaksananya gelar operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan laut dan perairan umum yang pengelolaannya menjadi kewenangan



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi output adalah terlaksananya gelar operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di perairan laut dan perairan umum pada 6 (tujuh) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara) dengan hasil pelaksanaan kegiatan berupa :

- Terperiksanya 103 unit kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di perairan laut dan perairan umum di Kalimantan Barat;
- Terlaksananya gelar operasi selama 30 hari; dan
- Ditemukan adanya pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan yang diperiksa berukuran < 10 GT terkait dengan kelengkapan dokumen perizinan usaha perikanan tangkap (SIUP, SIPI, SIKPI, SPB dan SLO) dan penggunaan alat tangkap yang dilarang. Outcome kegiatan ini adalah semakin tertibnya kegiatan usaha penangkapan ikan di Kalimantan Barat. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

- 3) Pemeliharaan Dan Perawatan Kapal Pengawas Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp 94.950.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.349.929,-. Target output berupa perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan. Realisasi output yaitu pemeliharaan kapal pengawas perikanan berupa perawatan dan pengecatan bodi kapal (docking), perbaikan dan penggantian suku cadang mesin penggerak utama dan mesin pendukung KPP Bi'lao 01 dan Bi'lao 02. Outcome kegiatan ini berupa terjaganya kondisi kapal pengawas perikanan dengan baik dan siap beroperasi setiap saat. Persentase kinerja 100%.

E. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.056.512.724,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 714.459.092,-. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan Peningkatan Sarana/Prasarana dalam rangka Mendukung Sistem Logistik Komoditas Hasil Perikanan Kalbar** dengan pagu anggaran Rp. 184.872.000,- dan realisasi Rp. 181.377.800,-. target output kegiatan ini adalah 51 unit sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) ikan. Realisasi Output Kegiatan ini adalah pemberian bantuan sebanyak 51 unit sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) ikan di Kabupaten Mempawah sebagai berikut :



1. Poklahsar Nusa Damai 1 unit freezer, 2. Poklahsar Suka Maju 2 unit pengolah kerupuk, 3. Poklahsar Usaha Bersama 2 unit pengolah kerupuk, 4. Poklahsar Cahaya Mandiri 1 unit cool box, 5. Poklahsar Usaha Mandiri 2 unit gas pressure fryer, 6. Poklahsar Hasil Laut 2 unit gas pressure fryer, 7. Poklahsar Usaha Baru 2 unit pengolah kerupuk, 8. Poklahsar Cahaya Muda 2 unit coolbox, 9. Poklahsar Cahaya Fajar 2 unit coolbox, 10. Poklahsar Cahaya Baru 2 unit coolbox, 11. Poklahsar Secapah Jaya 2 unit coolbox, 12. Poklahsar Sumber Rezeki 2 unit coolbox, 13. Poklahsar Mekar Satu 2 unit coolbox, 14. Poklahsar Pucuk Teratai 1 unit coolbox; Kota Singkawang sebagai berikut : 15. Poklahsar Mekar jaya 1 unit freezer, 16. Poklahsar Sejahtera 2 unit coolbox, 17. Poklahsar Barokah 1 unit Gass pressure fryer ; Kabupaten Sambas sebagai berikut : 18. Poklahsar Usulan Bersama 6 unit pengolah kerupuk, 19. Poklahsar Krisi Batu 6 unit vacuum sealer; Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut : 20. Poklahsar Vega Bersatu 5 unit vacuum sealer, 21. Poklahsar Vega Jaya 5 Unit gas pressure fryer. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya mutu produk hasil olahan dan pemasaran hasil perikanan dan berdaya saing. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.

2) **Apresiasi Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan** dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 77.400.000,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah kegiatan apresiasi pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebanyak 30 Peserta. Realisasi Output Kegiatan ini adalah terselenggaranya Kegiatan Apresiasi Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari UMKM dan Dinas Kab/Kota berupa pelatihan penganekaragaman produk olahan dari bahan dasar ikan yang dilaksanakan di Kartika Hotel Pontianak. Outcome kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan asal Kalimantan Barat. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.

3) **Promosi Produk Hasil Perikanan Kedalam dan Keluar Negeri/BIMB-EAGA** dengan pagu anggaran Rp. 95.507.724,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.355.447,-. Target output kegiatan ini adalah melaksanakan promosi produk perikanan kedalam dan luar negeri. Dan realisasi outpun kegiatan ini adalah mempromosikan potensi bahari, sumberdaya dan produk kelautan dan perikanan serta potensi wisata bahari untuk investasi kepada kalangan investor yang



dilaksanakan di Grand City Surabaya. Outcome dari kegiatan ini adalah semakin meningkatnya investasi dan permintaan pasar produk perikanan. Persentase kinerja kinerja yang dicapai 100 %.

- 4) **Pembinaan serta Penghimpunan Informasi Harga Pasar Produk Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi se-Kalbar** dengan pagu anggaran sebesar Rp.34.881.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.688.000,- selanjutnya target output kegiatan ini adalah terbinaanya pemasar produk hasil perikanan di Kalimantan Barat. Dan realisasi output kegiatan ini adalah terbinaanya serta terhimpunnya Informasi Harga Pasar Produk Perikanan dan untuk mengetahui informasi Harga Ikan yang beredar serta jumlah pasar yang tersebar di Kalimantan Barat. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan mutu produk olahan yang dipasarkan. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.
- 5) **Dukungan Forikan Kalbar** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 118.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.301.000,-. Target output kegiatan ini adalah melaksanakan Kampanye Makan Ikan. Dan realisasi output kegiatan ini adalah meningkatnya konsumsi Ikan masyarakat terutama pada anak-anak sekolah, mengenalkan diversifikasi produk olahan hasil perikanan, meningkatkan pemahaman tentang gizi ikan serta membentuk sumberdaya manusia yang sehat, kuat dan cerdas yang dilaksanakan 1 kali di Kabupaten Sekadau. Outcome dari kegiatan ini adalah jumlah Forikan yang terbentuk di Kabupaten /Kota. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.
- 6) **Pengelolaan Perizinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Kalbar** dengan pagu anggaran Rp. 41.100.000,- dan realisasi keuangan Rp. 41.040.000,-. Target output kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan rekomendasi teknis perizinan sebanyak 10 rekomendasi.. Realisasi Output Kegiatan Ini Adalah 1. dikeluarkanya SIUP 8, SPPI 19 dan SPI 5 rekomendasi. Outcome kegiatan ini adalah terjaminnya kesesuaian fisik usaha pemasaran dan pengolahan di lapangan dengan keterangan dokumen yang diterbitkan. Persentase Kinerja 100 %.
- 7) **Sertifikasi Kelayakan Unit Pengolahan Hasil Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.37.713.000,- selanjutnya target output kegiatan ini adalah rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sebanyak 12 rekomendasi. Dan realisasi output kegiatan ini adalah rekomendasi



Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 20 rekomendasi bagi UPI dan pengolahan/ pemasar yang akan mengajukan Sertifikat Kelayakan Pengolahan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Outcome dari kegiatan ini adalah peningkatan sertifikasi unit pengolahan hasil perikanan. Persentase Kinerja 100 %.

- 8) **Monitoring Unit Pengolahan (UPI) ke Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran Rp.40.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.602.000,- selanjutnya target output kegiatan ini adalah termonitoringnya jumlah UPI yang ada di Kab/Kota di Kalimantan Barat. Dan realisasi output kegiatan ini adalah termonitoringnya jumlah UPI (unit pengolahan Ikan yang ada di Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat, dari Kabupaten Kota yang telah termonitoring didapat jumlah pengolah 298 unit, yang diambil dari 12 Kabupaten Kota dan 2 Kabupaten belum menyerahkan jumlah pengolahnya. Outcome dari kegiatan ini adalah Pembinaan UPI yang ada di Kab/Kota di Kalimantan Barat. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 9) **Pembinaan dan Pemantauan Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.952.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.208.000,-. Kegiatan ini merupakan dalam rangka memonitoring kelompok – kelompok pengolah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang telah diberikan bantuan sarana dan prasarana berupa peralatan pengolahan atau pemasaran oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Target output dari kegiatan ini adalah termonitoringnya kelompok pengolah dan pemasar sebanyak 10 Kelompok. Realisasi output kegiatan ini yaitu termonitoringnya sebanyak 13 Kelompok Poklahsar, yang berasal dari kabupaten Mempawah sebanyak 5 Kelompok, Kota Singkawang 5 kelompok, dan Kabupaten Sambas Sebanyak 3 Kelompok. Outcome dari kegiatan ini adalah optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 10) **Pengadaan Sarana Pemasaran Kabupaten Mempawah** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.083.845,- Target output kegiatan ini adalah pemberian bantuan sarana pemasaran kepada kelompok-kelompok pemasar produk kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Mempawah sebanyak 41 unit coolbox. Realisasi output berupa pemberian bantuan sebanyak 41 unit coolbox, dengan rincian penerima sebagai berikut :
 - 1) Poklahsar Kelapa Empat 11 unit coolbox;
 - 2) Poklahsar Angin



Senja 20 unit coolbox; 3) Poklahsar Penjaja Ikan 10 unit coolbox. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran bagi kelompok pemasar kelautan dan perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

- 11) **Pengadaan Sarana Pengolahan Kabupaten Mempawah** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 320.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.690.000,-. Kegiatan ini merupakan pemberian bantuan sarana pengolahan kepada kelompok-kelompok pengolah produk kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Mempawah. Target output kegiatan ini adalah 2 paket bantuan yang terdiri dari alat 1 paket alat pengolah ikan dan 1 paket alat pengolah kerupuk, Realisasi output tidak tercapai dikarenakan kesalahan pada saat perencanaan anggaran, dan terlambatnya melakukan revisi, dan adanya surat Gubernur nomor 027/2811/Adm.PPBJ-C tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembatalan Proses/Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah dilakukan verifikasi kelompok, sehingga lelang untuk kegiatan ini tidak dilaksanakan. Outcome kegiatan ini tidak ada. Presentase kinerja tidak ada.

F. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 206.348.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.248.000,- . Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Penerapan K5 (Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Keamanan dan Keselamatan) di Pelabuhan Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.440.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.440.000,-. Target Output kegiatan ini adalah terlaksananya penerapan K5 (Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Keamanan dan Keselamatan) di pelabuhan perikanan. Realisasi output kegiatan ini adalah terwujudnya laporan kegiatan tersebut dalam upaya pengendalian keamanan di kawasan pelabuhan terutama pada saat kegiatan Bongkar Muat ikan di dermaga Pelabuhan Perikanan hasil tangkapan dari kapal Nelayan selama tahun 2018 sebanyak 289 Kali kapal bongkar muat ikan dengan total produksi 4.532,931 Kg, kegiatan kerja bakti untuk membersihkan merawat lingkungan sebanyak 12 Kali, penertiban Parkir kendaraan yang masuk dalam kawasan Pelabuhan Perikanan. Outcome dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih, indah, sehat, aman dan nyaman. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.



- 2) **Monitoring dan Evaluasi Perkembangan dan Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan Kalbar** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.564.000,- dan realisasi sebesar Rp. 37.564.000. Target output kegiatan ini adalah terlaksananya monev Perkembangan dan Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan ikan di Kabupaten 5 (Lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang khusus kegiatan operasional kesyahbandaran. Realisasi output berupa Perjadin dalam rangka Monev operasional Kesyahbandaran Kepaelabuhan Perikanan di lokasi Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) 1. PP. Selakau dan Pemangkat (Kab. Sambas), 2. PP. Suka Bangun dan PP. Kendawangan (Kab. Ketapang), 3.PP.Sukadana dan Teluk Batang (Kab. Kayong Utara). 4. PP. Bakau Kecil, PP Bakau Besar, PP. Sungai Pinyuh dan PP Kuala Mempawah (Kab. Mempawah), 5. PP.Kuala (Kota Singkawang). Outcome dari kegiatan ini adalah terpantaunya perkembangan dan pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan khususnya operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.
- 3) **Inspeksi Kapal Perikanan dan Pembinaan Mutu Ikan diatas Kapal** dengan pagu anggaran Rp. 40.385.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.335.000,- Target output kegiatan ini adalah terlaksananya inspeksi kapal perikanan dan pembinaan mutu ikan di kapal. Realisasi output berupa Inspeksi Kapal Perikanan dan membina penanganan mutu ikan diatas kapal serta melihat kelengkapan sarana/bahan/alat penanganan mutu serta melakukan kegiatan pemantauan kegiatan bongkar muat ikan hasil tangkapan di PPI maupun TPI di Kab.Kota di Kalbar. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan/keterampilan nelayan tentang penanganan ikan di atas kapal agar terjaga mutunya. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 4) **Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.780.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.780.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah berupa laporan terlaksananya pelayanan pusat informasi dari pelabuhan perikanan (PIPP) 13 Dokumen. Realisasi output yang dicapai terlaksananya penginputan data-data kegiatan Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada setiap hari dan jam kerja melalui aplikasi jaringan internet <http://www.pipp.dpt.go.id> selama Satu tahun sebanyak 677 kali Data kedatangan dan 729 kali data



keberangkatan kapal serta data informasi lainnya dan di buat laporan bulan setiap bulan sebanyak 12 Dokumen laporan bulanan dan satu laporan tahunan. Outcome yang dicapai yaitu tersedianya informasi pengembangan dan peningkatan produksi dari pelabuhan perikanan tangkap dan informasi mengenai profil pelabuhan perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Presentase kinerja yang dicapai 100 %.

- 5) **Pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan** dengan pagu anggaran Rp. 35.295.000,- dan realisasi sebesar Rp. 35.295.000,-. Target output kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan untuk 4 kegiatan pelayanan berupa Pengaturan dan Penempatan Kapal-Kapal Perikanan di Dermaga Pelabuhan Perikanan, Penerbitan Surat Tanda Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pemeriksaan Log Book Kapal Perikanan. Realisasi output kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan sesuai SOP di Pos Pelayanan Terpadu kepada Nelayan berupa Pengaturan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Dermaga Pelabuhan Perikanan = 1.630 Kali, penerbitan Surat Tanda Lapor Kedatangan dan Kedatangan Kapal (STBLKK) = 1,610 Dok, Penerbitan Surat Tanda Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) = 818 Dok, dan Pemeriksaan Log Book Kapal Perikanan = 532 Dok. Outcome dari kegiatan ini adalah pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100 %.

- 6) **Pelayanan Kepelabuhanan** dengan pagu anggaran Rp, 42.884.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 42.834.000,-. Selanjutnya Target Output kegiatan ini adalah terlaksananya operasional pengembangan pelayanan kepelabuhanan. Realisasi output kegiatan berupa : Tambat Labuh Kapal, Sewa Lahan Gudang Penampungan, Sewa Penggunaan Rumah/Bangunan, Sewa Crane House dan Crane beroda, Jasa Pengadaan Es, Jasa Pengadaan Air, Perawatan dan Perbaikan kapal, Pas masuk pelabuhan Perikanan (Motor, Mobil, Berlangganan). Outcome dari kegiatan ini adalah pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

- G. Program Pengembangan dan Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Fungsi Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 748.879.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 722.080.800,-. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :



- 1) **Pengujian Profisiensi** dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.797.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 21.797.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah terlaksananya metode pengujian profisiensi dengan meningkatkan kompetensi analis Laboratorium yang telah terakreditasi dan realisasi output kegiatan ini adalah terlaksananya metode pengujian profisiensi dengan meningkatkan kompetensi analis Laboratorium yang telah terakreditasi. Outcome dari kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan pengujian mutu hasil perikanan parameter uji mikrobiologi, kimia yang sesuai SNI oleh KAN. Persentase kinerja 100 %.
- 2) **Survailance Laboratorium Akreditasi** dengan pagu anggaran sebesar Rp 52.268.000,- dan realisasi sebesar Rp 29.958.400,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah metode pengujian yang terakreditasi uji kimia, mikrobiologi dan organoleptik. Realisasi output kegiatan ini adalah terlaksananya metode pengujian yang terakreditasi uji kimia, mikrobiologi dan organoleptik. Outcome dari kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan pengujian mutu hasil perikanan parameter uji mikrobiologi, kimia yang sesuai SNI oleh KAN. Persentase kinerja 100 %.
- 3) **Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.350.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 13.736.200,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah terlaksananya metode pengujian mikrobiologi dengan 4 parameter uji mikrobiologi. Realisasi output kegiatan ini adalah terlaksananya metode pengujian mikrobiologi dengan 4 parameter uji mikrobiologi. Outcome dari kegiatan ini adalah peningkatan pelayanan uji mutu dengan terlaksananya metode pengujian mikrobiologi dan Penerapan Standar SNI oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Persentase kinerja 100%.
- 4) **Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia** dengan pagu anggaran sebesar Rp 57.637.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.394.100,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini terlaksananya metode pengujian kimia dengan 7 parameter uji kimia validasi dan verifikasi. Dan realisasi output kegiatan ini yaitu terlaksananya metode pengujian kimia dengan 7 parameter uji kimia validasi dan verifikasi. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan pengujian mutu hasil perikanan parameter uji kimia yang up to date yang sesuai SNI oleh KAN. Persentase kinerja 100%.



- 5) **Pengadaan Media/Reagensia** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 283.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 282.135.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah pengadaan bahan media reagensia untuk uji mikrobiologi, uji kimia dan sulfat sanitasi. Realisasi output kegiatan ini adalah berupa pengadaan media reagensia tersebut yang rutin dilaksanakan setiap tahun dengan pengadaan per triwulan. Media reagensia diperuntukkan sebagai media pengujian sampel, pembinaan dan monitoring dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan untuk uji mikrobiologi, uji kimia dan sulfat sanitasi.. Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian sesuai standar ISO-GUIDE 17025. Persentase kinerja 100%.
- 6) **Audit Internal ISO GUIDE 01-17025** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.891.000,- dan realisasi keuangan sebesar 10.891.000,-. Selanjutnya target output kegiatan ini adalah untuk mencocokkan/ mensinkronkan kesesuaian data antara seksi pengujian dan tata usaha untuk mengetahui apakah telah menerapkan / menjalankan pekerjaan sesuai dengan Panduan Mutu yang telah dibuat sesuai dengan ISO Guide 17025. Outcome dari kegiatan ini adalah tersusunnya data tata usaha secara rapi dan lengkap. Persentase kinerja dicapai adalah 100%.
- 7) **Kajiterap Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan** dengan pagu anggaran sebesar Rp 19.234.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.192.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah terlaksananya teknologi pengolahan hasil perikanan yang terbaru pada produk olahan hasil perikanan dan realisasi output kegiatan ini adalah berupa kegiatan yang dilakukan di daerah yang potensial terhadap pengolahan hasil perikanan, kegiatan ini memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Barat dengan cara mengolah dan memodifikasi produk olahan tersebut sehingga mempunyai daya jual yang tinggi dan sesuai dengan standar ISO 9001. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pengolahan hasil perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100%
- 8) **Ketelusuran/Traceability Suplier/Pemasok Hasil Perikanan dari Hulu ke Hilir** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.350.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah pengusaha/pemasok suplier perikanan dapat menerapkan penanganan hasil perikanan yang baik dan realisasi output kegiatan ini berupa penerapan penanganan hasil perikanan yang baik oleh



- pengusaha/pemasok supplier. Outcome dari kegiatan ini adalah kesadaran mutu hasil perikanan meningkat. Persentase kinerja 100%.
- 9) **Monitoring dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di TPI/PPI, Pelabuhan Perikanan, Budidaya Ikan, Hatchery, Kapal Ikan dan Pasar** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137.592.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 137.472.500,-. Selanjutnya target output kegiatan adalah pengusaha/pemasok supplier perikanan dapat menerapkan penanganan hasil perikanan yang baik dan realisasi output kegiatan ini berupa penerapan penanganan hasil perikanan yang baik oleh pengusaha/pemasok supplier. Outcome dari kegiatan ini adalah jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase kinerja yang dicapai 100%.
- 10) **Pemeriksaan Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-Pasar se-Kalimantan Barat** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.938.500,- dan realisasi sebesar Rp. 78.684.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian sampel produk hasil perikanan di 5 kab/kota dan realisasi output kegiatan ini berupa laporan pengujian sampel langsung ditempat dilapangan di 5 kabupaten/ kota dalam rangka menunjang jaminan mutu dan perlindungan konsumen terhadap produk hasil perikanan yang dipasarkan secara tradisional/ modern pada pasar-pasar tersebut. Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya produk hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi. Persentase kinerja 100%.
- 11) **Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Daerah Perbatasan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.206.000,- dan realisasi sebesar Rp. 64.906.000,-. Selanjutnya Target output kegiatan ini adalah hasil uji produk perikanan dari 4 daerah perbatasan dan realisasi output kegiatan ini berupa terlaksananya hasil uji produk perikanan dari 4 daerah perbatasan. Outcome dari kegiatan ini adalah memberikan jaminan mutu produk hasil perikanan di 4 daerah perbatasan yang aman dikonsumsi masyarakat sesuai dengan SNI ISO / IEC-Guide 17025:2008. Persentase kinerja yang dicapai 100%.

Berdasarkan tabel 6 diatas, maka terlihat bahwa data produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan merupakan produksi yang berasal dari kegiatan usaha perikanan tangkap dan budidaya, yang nantinya merupakan sumber utama bahan baku dalam olahan produksi hasil perikanan maupun dalam bentuk segar pada ikan yang dikonsumsi masyarakat.



Selanjutnya Sasaran Strategis (yang tercantum dalam renstra dan renja SKPD) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana tabel 7 berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi				Tingkat Kemajuan (%)
			2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya pengembangan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kepastian hukum untuk usaha pada sektor kelautan dan perikanan	1 Dukungan Provinsi dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (dokumen)	1	1	4	2	100,00
		2 Jumlah Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dibina dan diberdayakan (Kelompok)	28	28	29	25	(10,71)
		3 Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang dibina, dikelola dan dimanfaatkan (pulau)	2	2	3	3	50,00
2	Meningkatnya fungsi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk habitat dan berkembangbiaknya sumberdaya ikan Kalbar	4 Jumlah Kawasan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah direhabilitasi dan dikonservasi (lokasi)	3	4	3	3	(25,00)
3	Meningkatnya produktifitas usaha Perikanan Tangkap Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan SDI secara Optimal	5 Nilai Tukar Nelayan (%)	106,50	104,26	106,50	108,16	3,74
		6 Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)	180.107,84	162.367,22	190.506,96	165.445,27	1,90
		7 Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibina (kelompok)	80	85	80	90	5,88
4	Semakin Optimalnya Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Sui Rengas untuk Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	8 Jumlah Kapal Ikan yang Sandar dan Melakukan Bongkar Muat di Pelabuhan Perikanan Sui Rengas (Unit)	2.500	1.588	2.750	1.610	1,39
		9 Volume Ikan Hasil Tangkapan Nelayan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Sui Rengas (Ton)	6.200	3.798	6.700	4.704,92	23,88
		10 Jumlah Pengguna Jasa lainnya pada sektor usaha Perikanan di Kawasan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sui Rengas (Unit)	12	13	14	15	15,38
5	Meningkatnya produktifitas Usaha Perikanan Budidaya Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Terpeliharanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan	12 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (%)	101,50	98,65	102,00	98,51	(0,14)
		13 Volume produksi Perikanan Budidaya (ton)	71.643	77.927,15	85.971	83.227,39	6,80
		14 Jumlah Pembudidaya Ikan yang dibina (pembudidaya)	334	308	344	308	-
6	Optimalisasi Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Produksi Benih Ikan dan Benur Udang Unggul UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut untuk Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	15 Jumlah Produksi Benih/Benur Unggul Komoditas Ikan Air payau dan Laut (ekor)	1.729.860	1.732.150	1.902.847	2.662.900	53,73
		16 Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	4	6	2	2	(66,67)
7	Meningkatnya Produktifitas Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Promosi Secara Optimal	17 Volume Produksi Ikan Hasil Olahan (Ton)	96.260	19.470,74	101.070	32.618,4	67,53
		18 Tingkat konsumsi makan ikan (Kg/org/thn)	37	36,43	38	38,91	6,81
		19 Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang dibina (kelompok)	100	102	110	74	(27,45)
8	Semakin Optimalnya Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	20 Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang Diberikan Kepada Unit Pengolah Ikan dan Masyarakat (kali)	161	242	166	315	30,17
		21 Sentra Pengembangan Usaha Perikanan yang mendapatkan Pemantauan, Pengendalian dan Pengujian Mutu (unit usaha)	102	143	122	120	(16,08)
9	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan hukum pada sektor kelautan dan perikanan Kalbar	22 Jumlah kelompok masyarakat pengawas kelautan dan perikanan yang aktif (kelompok)	40	64	45	64	-

2018 *) Data Sementara



Berdasarkan tabel 7 diatas, maka terlihat bahwa data (yang tercantum dalam renstra dan renja SKPD) sebagian mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Se-Kalbar pada tahun 2018 bertambah menjadi 2 dokumen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena telah selesainya/ finalnya Dokumen RZWP-3-K.
- Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dibina dan Diberdayakan pada tahun 2018 adalah 25 menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 pembinaannya difokuskan kepada kelompok pesisir yang dicanangkan sebagai kawasan konservasi daerah menuju persiapan ke desa mandiri di pesisir.
- Jumlah Pulau-pulau Kecil yang dibina, dikelola dan dimanfaatkan sebanyak 3 pulau meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini karena Dokumen RZWP-3-K sudah jadi, sehingga kewenangan Provinsi menjadi lebih jelas.
- Nilai Tukar Nelayan/NTN yaitu pada tahun 2018 ini sebesar 108,16% yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini karena terjadi peningkatan produksi dan kenaikan harga satuan ikan yang menyebabkan nilai produksi juga meningkat, yang berimplikasi pada bertambahnya pendapatan para nelayan/pelaku usaha penangkapan.
- Volume produksi perikanan tangkap sebesar 165.445,27 ton meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, meningkatnya trip melaut kapal perikanan dan didukung dengan iklim yang kondusif pada usaha perikanan tangkap.
- Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibina sebanyak 90 kelompok, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena meningkatnya kesadaran para nelayan untuk berkelompok dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap.
- Jumlah kapal ikan yang sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat di di UPT Pelabuhan Perikanan sebanyak 1.610 kapal/kali, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah kapal perikanan yang berpangkalan di UPT Pelabuhan Perikanan jumlahnya bertambah dari 77 kapal tahun 2017 menjadi 127 kapal tahun 2018; cuaca/alam yang mendukung sehingga kapal dapat melakukan



penangkapan/operasional berlayar dapat beberapa trip dalam 1 Tahun ini (2018); Adanya kapal-kapal dari luar seperti Jakarta, Kepulauan Riau yang melakukan bongkar muat ikan dan sandar di Dermaga UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar.

- Volume ikan hasil tangkapan nelayan yang mendaratkan di UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar pada tahun 2018 sebnayak 4.705 Ton, meningkat dibanding tahun sebelumnya, hal ini karena bertambahnya jumlah kapal yang datang dan mendaratkan ikan di dermaga UPT Pelabuhan Perikanan dari 778 trip pada tahun 2017 menjadi 792 trip pada tahun 2018; Cuaca/alam yang mendukung sehingga kapal dapat melakukan penangkapan/operasional berlayar beberapa trip dalam 1 tahun (2018); Kondisi perairan dan potensi ikan wilayah tangkapan (711 maupun perairan Laut Prov Kalbar) semakin baik, hal ini dampak dari baiknya sistem pengawasan sumberdaya ikan yang dilaksanakan dan berkurang/tidak adanya lagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah WPP 711 dan perairan laut Prov. Kalbar.
- Jumlah pengguna jasa lainnya dalam mendukung usaha perikanan di kawasan UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar sebanyak 15 unit, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena bertambahnya jumlah sarana unit usaha yang dibangun dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan untuk berusaha seperti : seperti gudang, kantin dan unit pengolahan/penyimpanan beku produk perikanan dan galang pembuatan kapal perikanan.
- Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi sebesar 98,51 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingginya biaya operasional (harga pakan tinggi).
- Volume produksi budidaya yaitu sebesar 83.227,39 ton mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya ikan yang baik dan banyaknya paket bantuan sarana produksi (benih dan pakan) yang diberikan kepada masyarakat dari Dinas Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.
- Jumlah produksi benih/benur unggul komoditas air payau dan laut sebanyak 2.662.900 ekor mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dukungan kondisi alam yang baik dan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sehingga mortalitas benih/benur rendah, serta adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai.



- Jumlah Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) sebanyak 2 sertifikat menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 91 Tahun 2017, terjadi perubahan nomenklatur dan kewenangan, yang semula mengurus tawar, payau dan laut berubah kewenangannya hanya pada budidaya payau dan laut, sehingga komoditas yang baru diajukan sertifikasinya hanya udang windu dan nila salin.
- Volume produksi ikan hasil olahan sebanyak 32.618,4 ton mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena sejalan dengan meningkatnya volume produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai bahan baku olahan ikan.
- Tingkat konsumsi makan ikan sebesar 38,91 kg/orang/tahun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena kesadaran masyarakat terhadap gizi yang terkandung di dalam ikan cukup tinggi dan gencarnya sosialisasi serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota.
- Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina sebanyak 74 kelompok, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena jumlah anggaran untuk pembinaan masih minim dan jumlah bantuan sarana dan prasarana untuk TA. 2018 hanya ada 24 kelompok.
- Jumlah layanan uji mutu hasil perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan masyarakat sebanyak 315 kali, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya penambahan ruang lingkup antara budidaya provinsi dan UPT serta penambahan parameter uji kimia (logam berat).
- Sentra pengembangan usaha perikanan yang mendapatkan pemantauan, pengendalian dan pengujian mutu sebanyak 120 unit usaha, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena belum terlaksananya sertifikasi produk hasil perikanan karena UPT belum memiliki Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (Akreditasi LS Pro).

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja, terdapat beberapa masalah yang muncul beserta solusi atau langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut yaitu sebagai berikut :



- **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Tingginya harga pakan dan ketersediaannya masih tergantung dari luar Kalbar sedangkan produksi pakan alternatif masih mengalami kendala kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu dan proses pengeringan yang masih mengandalkan pada panas matahari.
2. Penguasaan teknologi budidaya payau dan laut masih belum optimal
3. Masih banyak ditemui pelanggaran penangkapan ikan (illegal Unreported dan Unregulated Fishing) baik oleh kapal ikan asing maupun domestik, serta penangkapan ikan dengan merusak kualitas lingkungan (pengeboman, racun, dll)
4. Penertiban perizinan usaha penangkapan kapal 5 – 30 GT belum berjalan optimal

- **Solusi**

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan program GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) serta meningkatkan sarana dan prasarana produksi pakan ikan alternatif
2. Melakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan teknologi budidaya air payau dan laut
3. Peningkatan pengawasan secara terpadu antara aparat TNI-AL, Polri dan Pengawas Perikanan
4. Melakukan Gerai Perizinan di Prov. Kalbar

3. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada



B A B. V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Jawa Tengah

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 523.33/2400/2018 dan 027/713/DKP-PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Kerjasama Andon Penangkapan Ikan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-
S2	2	Org	Pembina Utama Madya	-	-
S1/DIV	7	Org	Pembina Utama Muda	-	Org
DIPLOMA III	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	-	Org
SMA/SMK	2	Org	Penata Tingkat I	6	Org
SMP	-	Org	Penata	2	Org
SD	-	Org	Penata Muda Tingkat I	1	Org
			Penata Muda	-	Org
			Pengatur Tingkat I	1	Org
			Pengatur	2	Org
			Pengatur Muda Tingkat I	-	Org
			Pengatur Muda	-	Org
			Juru	-	Org
JUMLAH	13	Org	JUMLAH	13	Org

7. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang termasuk dalam kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha



Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran total sebesar Rp. 153.354.500,-

8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 21 Agustus 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.

B. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Kepulauan Riau

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor 523/DKP-PT/001/XI/2018 dan 027/955/DKP-PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Kerjasama Andon Penangkapan Ikan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-
S2	2	Org	Pembina Utama Madya	-	-
S1/DIV	7	Org	Pembina Utama Muda	-	Org
DIPLOMA III	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	-	Org
SMA/SMK	2	Org	Penata Tingkat I	6	Org
SMP	-	Org	Penata	2	Org
SD	-	Org	Penata Muda Tingkat I	1	Org



KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
			Penata Muda	-	Org
			Pengatur Tingkat I	1	Org
			Pengatur	2	Org
			Pengatur Muda Tingkat I	-	Org
			Pengatur Muda	-	Org
			Juru	-	Org
JUMLAH	13	Org	JUMLAH	13	Org

7. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang termasuk dalam kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran total sebesar Rp. 153.354.500,-
8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 2 November 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.

C. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Jawa Barat

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 523.411/11546/Tangkap dan 027/129/DKP_PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Kerjasama Andon Penangkapan Ikan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat



6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-
S2	2	Org	Pembina Utama Madya	-	-
S1/DIV	7	Org	Pembina Utama Muda	-	Org
DIPLOMA III	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	-	Org
SMA/SMK	2	Org	Penata Tingkat I	6	Org
SMP	-	Org	Penata	2	Org
SD	-	Org	Penata Muda Tingkat I	1	Org
			Penata Muda	-	Org
			Pengatur Tingkat I	1	Org
			Pengatur	2	Org
			Pengatur Muda Tingkat I	-	Org
			Pengatur Muda	-	Org
			Juru	-	Org
JUMLAH	13	Org	JUMLAH	13	Org

7. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang termasuk dalam kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran total sebesar Rp. 153.354.500,-
8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 20 Desember 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.



B A B. VI P E N U T U P

Dampak positif secara langsung dari pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan ini antara lain; telah mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi baru pada sektor usaha kelautan dan perikanan beserta usaha pendukungnya, penyerapan tenaga kerja baru pada sektor perikanan, meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kalimantan Barat karena ketersediaan protein asal ikan tersedia secara cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Produksi perikanan sebagian besar berasal dari perikanan tangkap (laut dan perairan umum). Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi alam/ketergantungan alam (ketersediaan sumberdaya ikan, cuaca dan sebagainya) yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Untuk dapat menjamin kontinuitas produksi perikanan, maka dapat dilakukan dengan mengendalikan sarana perikanan tangkap yang meliputi kapal perikanan, alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan dengan harapan produksi hasil tangkapan ikan akan meningkat, antara lain dengan: 1) memodernisasi perikanan tangkap dengan alat penangkap ikan yang modern dan alat batu yang efektif dan efisien 2) trip hari operasi penangkapan ikan yang lebih lama. Dan selain itu, untuk menjaga kontinuitas produksi perikanan (bahan baku) juga dapat dilakukan dengan pengembangan usaha pembudidayaan ikan secara intensif maupun ekstensif meliputi budidaya ikan air tawar, payau dan laut.

Saat ini alat penangkap ikan seperti Trawl/Lamdas tetap dilarang digunakan di seluruh Wilayah pengelolaan Perikanan seluruh Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Maka sebagai alternative solusi dengan melakukan penggantian alat tangkap terlarang secara bertahap, mengingat penggantian memerlukan anggaran yang cukup besar. Transisi kepada alat/penggantian alat penangkap ikan ramah lingkungan dapat dilakukan secara baik dengan meminimalisir permasalahan di kalangan nelayan, antara lain sebelum penggantian dilakukan sosialisasi, identifikasi calon penerima alat pengganti, pemilihan alat penangkap pengganti yang sesuai dengan keterampilan nelayan dalam menggunakan alat penangkapan ikan, kondisi dan karakteristik nelayan, sasaran ikan yang ditangkap, kondisi dan karakteristik lingkungan dan sebagainya.

Selain itu untuk menjaga kontinuitas serta harga ikan agar tidak menurun pada saat musim ikan, maka perlu adanya sarana penyimpanan



ikan/cold storage terutama di lokasi Pelabuhan Perikanan dan sentra-sentra nelayan. Pembangunan cold storage dilakukan secara bertahap, diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang strategis, namun pembangunan dan operasional cold storage ini memerlukan biaya yang cukup besar. Permasalahan utama pembangunan cold storage di sentra-sentra nelayan ini adalah minimnya ketersediaan listrik dengan kapasitas yang cukup memadai untuk mengoperasikan cold storage.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga terbit Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K pada bulan Januari 2019. Dan kedepannya pengelolaan kelautan dan perikanan diarahkan berdasarkan dokumen RZWP3K yang telah disusun tersebut. Dan agar pemanfaatan sumberdaya ikan tetap lestari dan berkelanjutan, maka pengendalian dan pengawasan akan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam makin ditingkatkan, sehingga pelaku usaha akan semakin tertib dalam pengelolaan sumberdaya alam.